

RESEARCH ARTICLE

Analisis Kinerja Penanganan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat Dengan Menggunakan Metode *Logical Framework Analysis* (LFA)

Widya Lestari^{1*}, Basri Bado², Citra Ayni Kamaruddin³, Abd. Rahim⁴, Sri Astuty⁵

^{1,2,3,4,5}Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

Email: widya27502@gmail.com^{1*}, basri.bado@unm.ac.id², citraayni@unm.ac.id³, abd.rahim@unm.ac.id⁴, sri.astuty@unm.ac.id⁵

Histori Artikel:

Dikirim 19 Desember 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Februari 2026; Diterima 10 Maret 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Lestari, W., Bado, B., Kamaruddin, C. A., Rahim, A., & Astuty, S. (2026). Analisis Kinerja Penanganan Stunting di Provinsi Sulawesi Barat Dengan Menggunakan Metode Logical Framework Analysis (LFA). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1867-1879. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6157>.

Abstrak

Stunting merupakan tantangan serius dalam pembangunan manusia yang berdampak pada kinerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat yang selama beberapa tahun terakhir mencatat prevalensi tertinggi di Pulau Sulawesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dengan mengkaji keterkaitan antara tujuan, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Logical Framework Analysis (LFA). Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan program, serta publikasi resmi instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya prevalensi stunting di pengaruhi oleh keterbatasan akses pangan bergizi, rendahnya kualitas sanitasi dan air minum layak, tingginya pernikahan usia dini, serta belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting. Adapun rekomendasi kebijakan LFA dalam menangani stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah penguatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan lokal, penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, penguatan edukasi pencegahan pernikahan dini dan penyediaan bantuan pendidikan, serta peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara konvergen dan berkualitas melalui sinergi lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Penanganan stunting memerlukan upaya multidimensional dan kolaboratif yang melibatkan sinergi lintas sektor, komitmen pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan sumber pendanaan yang efisien dan tepat sasaran disertai pengawasan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Manusia; Stunting; LFA.

Abstract

Stunting remains a serious challenge in human development, as it adversely affects development performance and economic growth, particularly in West Sulawesi Province, which has recorded the highest stunting prevalence in Sulawesi over the past several years. This study aims to analyze the performance of stunting reduction efforts in West Sulawesi Province by examining the alignment between policy objectives, program implementation, and achieved outcomes. The research adopts a qualitative approach using the Logical Framework Analysis (LFA) method. The data utilized are secondary data derived from development planning documents, program implementation reports, and official publications from relevant government institutions. The findings indicate that the high prevalence of stunting is influenced by limited access to nutritious food, poor sanitation and inadequate access to safe drinking water, a high incidence of early marriage, and the suboptimal implementation of accelerated stunting reduction programs. Based on the LFA results, policy recommendations for addressing stunting in West Sulawesi Province include strengthening food security and promoting local food diversification; improving community-based drinking water supply and sanitation facilities; enhancing education and awareness programs to prevent early marriage alongside the provision of educational assistance; and improving the quality and effectiveness of both specific and sensitive interventions implemented in an integrated and convergent manner through cross-sectoral synergy at the national, regional, and village levels. Addressing stunting requires a multidimensional and collaborative approach that involves strong cross-sectoral coordination, sustained commitment from local governments, active community participation, and the efficient and well-targeted utilization of funding sources, supported by continuous monitoring and supervision.

Keyword: Human Development; Stunting; LFA.

1. Pendahuluan

Pembangunan adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik dengan manusia sebagai pusat dan modal utama keberlanjutan pembangunan (Jamaludin, 2016). Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, kesehatan menjadi bagian penting *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan kedua yang menekankan penghapusan kelaparan, peningkatan gizi, dan ketahanan pangan (Apriska *et al.*, 2022). Menurut *global nutrition report* (2016), Indonesia menempati urutan kedua prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja (Badan Pusat Statistika, 2024). Survei kesehatan Indonesia (2023), juga menegaskan bahwa stunting masih menjadi masalah gizi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia dibanding *wasting*, *underweight*, dan *overweight* (Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting, 2024).

Tingginya prevalensi stunting dan masih besarnya jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di berbagai wilayah Indonesia merupakan permasalahan serius yang tidak hanya memengaruhi kesehatan anak, tetapi juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia serta pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Khususnya di Pulau Sulawesi, mengingat data prevalensi stunting tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayahnya masih berhadapan dengan prevalensi stunting yang tinggi dan merata. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024 dengan target prevalensi sebesar 14 persen. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, anggaran memiliki peranan penting, sehingga pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen pendanaan untuk mendukung program penurunan stunting.

Tabel 1. Prevalensi Stunting, Jumlah KRS, dan DAK Penurunan Stunting di Pulau Sulawesi

No	Provinsi	Prevalensi Stunting (%)			Persentase KRS (%)			DAK Stunting	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	Alokasi	Realisasi
1	Sulawesi Barat	33,8	35,3	30,3	46,96	33,27	27,96	278,861 M	255,083 M
2	Sulawesi Selatan	27,4	27,2	27,4	34,88	19,68	13,94	418,417 M	403,533M
3	Sulawesi Utara	21,3	20,3	21,3	28,24	17,86	14,25	209,140 M	187,795 M
4	Sulawesi Tengah	25,3	21,1	27,2	40,72	27,07	22,65	204,290 M	408,440 M
5	Sulawesi Tenggara	30,2	27,7	30,0	42,07	26,80	21,34	385,267 M	204,220 M
6	Gorontalo	29,0	23,8	26,9	38,63	24,99	20,69	79,840 M	79,822M

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa selama periode 2021-2023 Provinsi Sulawesi Barat konsisten menjadi penyumbang tertinggi di Pulau Sulawesi baik dari sisi prevalensi stunting maupun KRS. Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk yang terkecil ke dua di Pulau Sulawesi. Secara teoritis, menurut Thomas Robert Malthus (1978), wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi meningkatkan risiko keterbatasan sumber daya, terutama pangan yang dapat menimbulkan masalah sosial dan kesehatan seperti stunting dan gizi buruk (Pratama, 2017). Berdasarkan teori malthus wilayah dengan jumlah penduduk tinggi seharusnya lebih rentan terhadap stunting. Namun, berbanding terbalik dengan kondisi di Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk terkecil kedua di Pulau Sulawesi justru memiliki prevalensi stunting yang tertinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya prevalensi stunting tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor demografi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan dan kinerja penanganan stunting di tingkat daerah. Selain itu, meskipun Provinsi Sulawesi Barat memperoleh DAK penurunan stunting yang relatif besar dan capaian kinerja relatif baik, prevalensi stunting di daerah ini masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara besarnya sumber daya yang dialokasikan dan hasil yang dicapai, sehingga mengindikasikan bahwa permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga dengan efektivitas pemanfaatannya dalam pelaksanaan program serta faktor lain yang dapat mempengaruhinya.

RESEARCH ARTICLE

Permasalahan tersebut, sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III (1980) menekankan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Prmono, 2020). Oleh karena itu, tingginya prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat meskipun didukung oleh alokasi anggaran yang memadai menegaskan pentingnya dilakukan analisis kinerja penanganan stunting untuk mengidentifikasi kelemahan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kondisi tersebut menegaskan pentingnya analisis kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dengan menempatkan capaian target dan realisasi sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan., sebagaimana dikemukakan oleh Tomas Dye (1981), yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak, di mana keberhasilannya dapat dinilai dari kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai (Abidin, 2016). Namun, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Sulawesi Barat, capaian kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa selama periode 2018–2023 pencapaian target penurunan stunting hampir disetiap tahunnya tidak tercapai, hanya ada satu periode realisasi sempat melampaui target. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan hasil yang dicapai, sehingga mencerminkan permasalahan dalam efektivitas kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Tabel 1 dan data BAPPERIDA, kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat belum optimal, tercermin dari target penurunan stunting yang belum tercapai secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di daerah tersebut. Permasalahan stunting tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi kualitas pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) guna menilai kesesuaian antara tujuan, strategi, keluaran, dan dampak kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap analisis kebijakan pembangunan, khususnya terkait efektivitas intervensi pemerintah dalam mengatasi stunting sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Stunting merupakan suatu keadaan anak yang pertumbuhan fisiknya terhambat akibatnya anak-anak yang mengalami stunting lebih pendek dari tinggi badan yang semestinya untuk usianya. Hal tersebut disebabkan karena malnutrisi kronis yaitu, kekurangan asupan gizi jangka panjang. Dimana keadaan tersebut dialami sejak masa kehamilan hingga masa awal kehidupan pascakelahiran. kekurangan gizi, baik pada anak maupun ibu selama kehamilan, yang dapat menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko berat badan lahir rendah (BBLR). Selain itu, pola makan tidak sehat dalam jangka panjang serta penyakit infeksi dapat mengganggu penyerapan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Kondisi lingkungan yang tidak sehat, terutama sanitasi buruk dan keterbatasan akses air bersih, turut memperburuk status gizi anak. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, juga berperan signifikan dalam terjadinya stunting (Maryuni *et al.*, 2024). Stunting merupakan masalah serius karena tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, mengganggu perkembangan kognitif dan sistem imun, serta menurunkan produktivitas dan pendapatan di masa depan, sehingga secara keseluruhan memengaruhi kualitas sumber daya manusia (Haskas, 2020). Menurut Bappenas (2020), upaya penanganan stunting masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman ibu mengenai pemenuhan gizi, pola konsumsi yang kurang sehat, serta kondisi ekonomi rumah tangga yang membatasi kemampuan keluarga dalam menyediakan pangan bergizi. Selain itu, di beberapa wilayah tertentu keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan semakin memperparah permasalahan stunting (Kawe *et al.*, 2025). Selain itu, program yang telah

RESEARCH ARTICLE

dirancang oleh pemerintah untuk penurunan stunting yang dilakukan baik secara intervensi sensitif maupun pada intervensi spesifik belum dilaksanakan secara maksimal. Kepala desa dan pihak puskesmas diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan sesuai program (Hadina *et al.*, 2022). Dalam upaya penanganan stunting program peningkatan ketahanan pangan untuk mencegah dan menekan jumlah stunting merupakan program yang sangat efektif dalam mengatasi dan menurunkan kasus stunting, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya berupa penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi kesehatan (Kristine Buulolo & Saragih, 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis *Logical Framework Analysis* (LFA). LFA berfungsi sebagai alat bantu dalam analisis, yang mempermudah perencana serta evaluasi untuk menelaah kondisi saat ini (Noriyah, 2010). Metode ini relevan terhadap pembangunan karena mampu memetakan strategi dan risiko masalah yang muncul. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen/ laporan dari instansi pemerintah maupun sumber relevan. Data mencakup kondisi yang menggambarkan kesehatan masyarakat dan laporan kinerja pemerintah yang dapat menggambarkan penanganan stunting di Sulawesi Barat. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, Rencana Strategis (RENSTRA) 2023–2026, dan Laporan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Ketiga dokumen ini dipilih karena secara langsung atau dapat menggambarkan perencanaan, strategi, dan capaian program penanganan stunting. Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahap utama yaitu, (1) analisis pemangku kepentingan, (2) analisis masalah menggunakan pohon masalah (*problem tree*), (3) analisis tujuan menggunakan pohon tujuan (*objective tree*), dan (4) analisis strategi dan penyusunan matriks *Logical Framework*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Stakeholder Analysis

Stakeholder adalah pihak yang dapat mempengaruhi atau terdampak oleh suatu program atau proyek. Analisis stakeholder digunakan dalam mengenali individu atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program tersebut (Macapagal & Macasio, 2009). Penelitian ini membutuhkan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya prevalensi stunting sehingga menyebabkan rendahnya kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Informasi tersebut telah secara jelas tertuang dalam beberapa dokumen yakni, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan studi literatur dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai masalah yang diteliti serta faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil analisis dokumen RPD, RENSTRA, dan Laporan Percepatan Penurunan Stunting terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab rendahnya penanganan stunting sehingga masih tingginya prevalensi stunting di Sulawesi Barat, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah. Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya:

- 1) Rendahnya konsumsi dan akses pangan bergizi disebabkan oleh, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi seimbang, serta adanya pengaruh dari faktor ekonomi, tingkat pendidikan, hingga kebiasaan atau budaya konsumsi yang belum mendukung pola makan sehat dan bergizi. Semua kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Sulawesi Barat.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Sulawesi Barat

No	Tahun	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
1	2020	9.16
2	2021	10.81
3	2022	9.82
4	2023	8.29

Berdasarkan tabel 2 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan sepanjang 2020–2023. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal. Dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi, Sulawesi Barat berada pada posisi menengah lebih baik dari Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, tetapi belum menyamai capaian Sulawesi Selatan yang relatif rendah dan stabil. Pada 2023, masih terdapat sekitar 122.781 penduduk atau 8,29 persen yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, angka yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan di wilayah ini masih memerlukan perhatian serius.

2) Rendahnya akses sanitasi dan air minum layak disebabkan oleh, adanya keterbatasan anggaran(APBD), masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, dan infrastruktur dasar yang belum memadai, serta rendahnya komitmen dan koordinasi pemerintah dalam meningkatkan mencapai target sanitasi dan air minum layak. Berikut adalah data yang menunjukkan seberapa besar akses rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat terhadap sanitasi dan air minum layak.

Tabel 3. Akses Sanitasi dan Air Minum Layak Sulawesi Barat

No	Tahun	Akses Sanitasi Layak (%)	Akses Air Minum Layak (%)
1	2020	77,07	77,07
2	2021	80,12	78,35
3	2022	78,88	78,98
4	2023	80,73	79,86

Berdasarkan tabel 3 akses terhadap sanitasi dan air minum layak di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren peningkatan selama 2020–2023, meskipun dengan fluktuasi pada beberapa periode. Pada 2023, akses sanitasi layak mencapai 367.789 rumah tangga atau 80,73 persen, sementara akses air minum layak mencapai 364.143 rumah tangga atau 79,86 persen. Rata-rata capaian sanitasi layak selama periode tersebut sebesar 79,2 persen, sedangkan peningkatan akses air minum layak berjalan relatif lambat. Kedua capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan jauh dari target pemerintah sebesar 100 persen, menunjukkan bahwa pemenuhan akses sanitasi dan air minum layak di Sulawesi Barat masih menghadapi tantangan yang memerlukan peningkatan upaya penanganan secara berkelanjutan.

3) Tingginya pernikahan anak usia dini disebabkan oleh, tingginya pernikahan dini yakni, faktor ekonomi masyarakat, faktor tradisi/budaya, masih kurangnya pemahaman masyarakat atas dampak dari pernikahan muda, dan faktor pergaulan bebas. Berikut adalah data yang menunjukkan tingkat pernikahan anak usia dini di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 4. Prevalensi pernikahan anak Provinsi Sulawesi Barat

No	Tahun	Prevalensi Pernikahan Anak (%)
1	2020	17,12
2	2021	17,71
3	2022	11,70
4	2023	11,25

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan Tabel 4 prevalensi pernikahan anak di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan, namun praktik ini masih menjadi persoalan serius karena implikasinya terhadap kesehatan ibu-anak dan risiko stunting. Pada 2023, tercatat 7.310 anak atau 11,25 persen menikah pada usia dini, angka yang masih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,92 persen serta belum mencapai target pemerintah sebesar 8,74 persen. Selain itu, Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di Pulau Sulawesi, sehingga penguatan intervensi lintas sektor tetap diperlukan.

4) Rendahnya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting disebabkan oleh, rendahnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat terkait dengan kesehatan dan gizi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, masih kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi layak, kurangnya konsumsi pangan bergizi. kendala pendataan serta jangkauan program yang membuat sebagian sasaran tidak terlayani, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana. rendahnya partisipasi dan pemanfaatan layanan akibat faktor pengetahuan, budaya, dan preferensi masyarakat, kondisi ekonomi, serta hambatan geografis dan cuaca yang mengganggu distribusi layanan dan pembangunan. Berikut adalah data yang menunjukkan bagaimana capaian pelaksanaan program pembangunan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 5. Capaian pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting Sulawesi Barat tahun 2023

No	Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Intervensi Spesifik (%)				
1	Bumil KEK dapat tambahan asupan gizi	90	46.1	51.2
2	Bumil konsumsi TTD minimal 90 Tablet	80	66.8	83.5
3	Remaja putri konsumsi TTD	58	56.8	97.9
4	Bayi < 6 bulan asi eksklusif	80	36.7	45.9
5	Anak 6-23 bulan mendapat MP-ASI	80	78.1	97.6
6	Balita gizi buruk ditatalaksanakan	90	80.7	89.7
7	Balita di pantau tumbuh kembang	90	65.0	84.7
8	Balita gizi kurang dapat asupan gizi	90	30.8	34.2
9	Balita imunisasi dasar lengkap	90	68.6	76.2
Intervensi Sensitif (%)				
10	Persentase pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan	70	35.0	50.0
11	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	16	10.8	67.5
12	Persentase PUS memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	83.3	38.6	46.3
13	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	97.9	79.0	80.69
14	Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	79.7	72.7	94.8
15	Persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	76.7	39.1	51.0

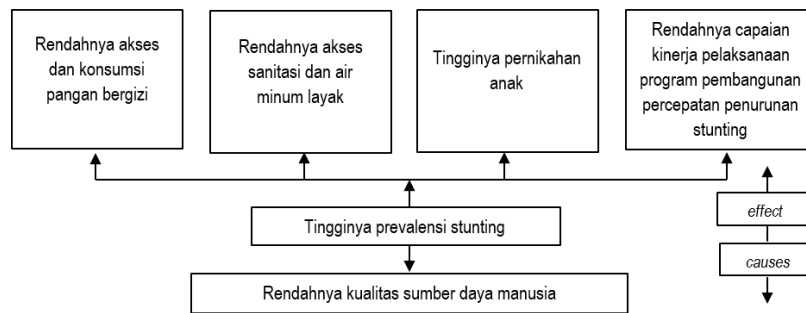
Berdasarkan tabel diatas, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Penurunan Stunting Tahun 2023 di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menerima alokasi sebesar Rp278,861 miliar dengan realisasi mencapai Rp255,083 miliar, dengan capaian yang baik sebesar 91,47%. Tingkat realisasi yang relatif tinggi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu menyerap sebagian besar anggaran yang dialokasikan. Namun, jika dikaitkan dengan data pada tabel 5 mengenai capaian pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik

RESEARCH ARTICLE

dan sensitif, terlihat bahwa tidak ada satu pun indikator yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya gap antara besarnya dukungan anggaran dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, seperti efektivitas alokasi yang belum optimal, ketidaktepatan sasaran program, atau adanya kendala dalam koordinasi lintas sektor yang berperan dalam implementasi intervensi. Meskipun realisasi anggaran berada pada tingkat yang cukup baik, capaian output dan outcome belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan anggaran yang efisien. Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait agar berbagai intervensi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Tingginya prevalensi stunting di Sulawesi Barat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal tersebut dapat di lihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Sulawesi Barat memiliki IPM terendah diantara provinsi lainnya yang ada di Pulau Sulawesi

4.1.2 Problem Analysis

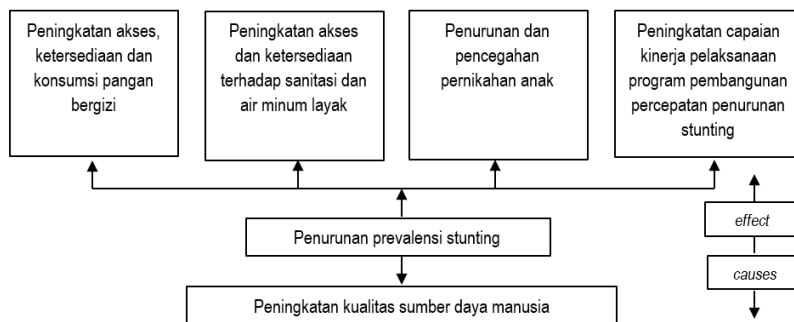
Problem analysis adalah proses mengidentifikasi akar sebab akibat suatu masalah untuk merancang tujuan kegiatan yang tepat, biasanya menggunakan metode pohon masalah (Macapagal & Macasio, 2009). Berikut adalah pohon masalah dari tingginya prevalensi stunting yang membuat penanganan stunting Sulawesi Barat masih rendah.



Gambar 1. Pohon Masalah (Problme Tree) Penanganan stunting

4.1.3 Objective analysis

Objective analysis adalah analisis untuk mengembangkan solusi dari masalah yang telah diidentifikasi, menggunakan metode pohon tujuan yang mengubah pernyataan negatif menjadi positif, tanpa harus mengubah semua masalah menjadi tujuan (Macapagal & Macasio, 2009). Berdasarkan analisis stakeholder dan problem, berikut adalah pohon tujuannya.



Gambar 2. Pohon Tujuan (Objective Tree) Penanganan stunting

RESEARCH ARTICLE

4.1.4 Strategy Analysis

Strategy analysis adalah analisis identifikasi strategi untuk mencapai solusi yang tepat (Macapagal & Macasio, 2009). Berikut adalah tabel analisis strategi dari penanganan stunting di Sulawesi barat.

Tabel 6. Analisis strategi penanganan stunting Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Penurunan prevalensi stunting	Meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> Sektor pola pangan harapan Presentase cadangan pangan Presentase penanganan daerah rawan pangan
		Meningkatkan akses dan ketersediaan sanitasi dan air minum layak	<ol style="list-style-type: none"> Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak
		Menurunkan dan mencegah pernikahan dini	<ol style="list-style-type: none"> Presentase pernikahan anak Angka partisipasi sekolah
		Peningkatan capaian kinerja pelaksanaan perogram pembangunan percepatan penurunan stunting	<ol style="list-style-type: none"> Presentase capaian pelaksanaan indikator-indikator intervensi sensitif dan intervensi spesifik Prevalensi Stunting

4.1.5 Logical Framework

Hasil dari analisis sebelumnya, digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan Logical Framework Matrix. Matriks LFA terdiri dari empat kolom, yang bertujuan sebagai pengembangan. Kolom pertama, "logika intervensi proyek", memuat fokus program, tujuan, hasil, dan kegiatan. Kolom kedua, berisi indikator untuk mengukur pencapaian tujuan dan hasil. Kolom ketiga, mencantumkan sumber verifikasi untuk memantau dan mengevaluasi indikator. Kolom keempat, memuat asumsi, yaitu faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan program (Noriyah, 2010). Berikut adalah matriks Logical Framework Analysis (LFA) dari penanganan stunting di Sulawesi barat.

Tabel 7. Matriks Logical Framework Analysis (LFA) penanganan stunting Provinsi Sulawesi Barat

Desain summary	Indicator	Means of verification	Assumption
Goal: Peningkatan kualitas sumber Daya manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi stunting <20% Indeks Pembangunan Manusia meningkat 1 poin setiap tahunnya 	Pemantauan hasil laporan dan data stunting dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sumber resmi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen dan koordinasi lintas sektor dan tercapainya target program Ketersediaan anggaran yang memadai
Purpose: Penurunan prevalensi stunting	Penurunan prevalensi stunting > 2% setiap tahunnya	Pemantauan hasil laporan dan data perkembangan prevalensi stunting (satgas stunting, kemenkes dan data sektoral provinsi)	Koordinasi multisektor berjalan baik dan tercapainya program kinerja penanganan stunting

RESEARCH ARTICLE

<p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan bergizi • Peningkatan akses sanitasi & air minum layak • Penurunan pernikahan anak • Tercapainya target pelaksanaan pembangunan percepatan penurunan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) • Presentase rumah tangga bersanitasi & air minum layak 100% • Penurunan prevalensi perkawinan anak tiap tahun • Capaian indikator intervensi spesifik & sensitif 	<p>Pemantauan hasil laporan dan data ketahanan pangan, presentase penyediaan infrastruktur dasar, prevalensi perkawinan anak, dan laporan intervensi spesifik dan sensitif (Data sektoral provinsi, publikasi kemenkes, dan satgas stunting)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif masyarakat • Pelayanan kesehatan yang optimal dan sarana prasarana yang memadai • Infrastruktur dasar yang memadai • Dukungan sumber daya (tenaga kesehatan/ kader, dan anggaran)
<p>Activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Follow-up program • Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan lokal • Edukasi pencegahan pernikahan anak • Penyediaan beasiswa pendidikan • Penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat • Peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan program intervensi spesifik dan sensitif melalui kerja sama lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi program sesuai rencana • Skor PPH, presentase cadangan pangan, dan penanganan daerah rawan pangan • Prevalensi perkawinan anak dan jumlah kegiatan edukasi • Angka Partisipasi Sekolah (APS) naik dan jumlah penerima beasiswa • Presentase rumah tangga bersanitasi dan air minum layak • Prevalensi stunting < 20% dan capaian intervensi spesifik dan sensitive 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kinerja pemerintah dan dokumen perencanaan • Pemantauan data dan laporan resmi pemerintah terkait ketahanan pangan, prevalensi perkawinan anak, dan infrastruktur dasar (BPS dan data sektoral pemerintah, kemenkes, dan satgas stunting) • Laporan konvergensi stunting (satgas stunting) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program dapat terlaksana sesuai target dan tepat sasaran • Partisipasi aktif tokoh agama, adat, dan masyarakat • Dana beasiswa berkelanjutan dan adanya akuntabilitas • Ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar yang baik • Koordinasi lintas sektor berjalan efektif dengan dukungan kebijakan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai.

4.2 Pembahasan

Stakeholder berperan penting dalam kinerja penanganan stunting sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis kinerja pemerintah dalam menangani stunting adalah ketersediaan dokumen resmi publikasi pemerintah seperti, Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dari berbagai dinas seperti dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan, dinas perumahan dan penata ruang, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Serta Laporan Percepatan Penurunan Stunting juga dibutuhkan untuk melihat bagaimana implementasi hasil pelaksanaan program tersebut. Dokumen tersebut menyajikan informasi yang relevan mengenai permasalahan penelitian beserta faktor penyebabnya, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami situasi dan merumuskan Solusi. Berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah rendahnya akses pangan dan konsumsi pangan bergizi, rendahnya akses terhadap sanitasi dan air minum layak, masih tingginya angka pernikahan dini, serta rendahnya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting. Tingginya prevalensi stunting di Sulawesi Barat menunjukkan kinerja penanganan

RESEARCH ARTICLE

yang masih rendah, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan RPD Sulawesi Barat tingginya prevalensi stunting menjadikannya sebagai isu pembangunan yang mendesak karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian. Laporan World Bank (2016) menunjukkan bahwa stunting dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi terhadap hilangnya hingga 11 persen Produk Domestik Bruto (GDP), sementara pendapatan individu yang mengalami stunting dapat turun hingga 20 persen pada usia produktif. Dampak tersebut memperbesar kesenjangan kesejahteraan dan mendorong terjadinya kemiskinan antargenerasi. Dari sisi kesehatan, stunting meningkatkan risiko kerusakan fungsi otak, menurunkan kecerdasan, serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Kondisi ini pada akhirnya menambah beban ekonomi kesehatan, karena meningkatnya kebutuhan pelayanan medis dan pembiayaan anggaran untuk penanganan penyakit terkait stunting. Secara makroekonomi, memperkirakan kerugian akibat stunting mencapai 2–3 persen dari PDB nasional. Selain itu, Hal ini menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah, 2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir merupakan potensi sumber daya manusia baru yang memiliki nilai produktivitas ekonomi tersendiri. Oleh karena itu, tingginya angka kelahiran yang disertai peningkatan kasus balita stunting berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penanganan stunting pada balita sangat penting, karena jika dibiarkan, masalah ini dapat berlanjut ke generasi berikutnya dan berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan. Dengan demikian, stunting memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa. Penelitian tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh yang (Andryansyah & Dewi, 2024), yang menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam penanganan stunting sangat penting untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam menanganai masalah ini agar mampu mencapai tujuan yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara kualitas sumber daya manusia dan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia yang unggul berdampak terhadap peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian terdahulu, menggambarkan bahwa manusia atau penduduk berperan penting dalam sebuah pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak pembangunan merupakan hal yang penting. Sejalan dengan teori *people centered development* yang di pelopori oleh Karto dan Alfanso pada tahun 1981, yang menyatakan bahwa penduduk diposisikan sebagai pusat pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Sebagai subjek pembangunan, penduduk harus dibangun dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan, dan sebagai objek, penduduk harus dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Hal ini, juga sejalan dengan *human development theory* yang dicetuskan United Nations Development Programme (UNDP) (1990), yang menyatakan bahwa betapa pentingnya pembangunan manusia. UNDP menjelaskan bahwa kekayaan bangsa yang sesungguhnya merupakan kualitas manusia (Hasan & Aziz, 2018). Teori-teori tersebut sejalan dengan agenda SDGs, khususnya Goal 2 (Tanpa Kelaparan) yang menekankan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertanian berkelanjutan. Perbaikan nutrisi juga mendukung target kesehatan seperti *maternal mortality*, *stunting*, dan *child mortality*, sekaligus membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sebagai modal pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini, sejalan dengan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020–2024, yang menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Maju 2045. Faktor-faktor penyebab rendahnya penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat berkaitan erat dengan kemiskinan. Sejalan, dengan teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953), kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan pada kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Menurut Andre Bavo Ala (1981), kemiskinan mencakup aspek primer (kurangnya aset sosial-politik, pengetahuan, keterampilan) dan aspek sekunder (minim jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi).

RESEARCH ARTICLE

Aspek kemiskinan tersebut manifestasinya terlihat pada kekurangan gizi, akses air, perumahan tidak sehat (infrastruktur), layanan kesehatan dan pendidikan yang buruk (Hasan & Aziz, 2018). Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan investasi pada manusia. Dalam teori human capital Schultz (1961), menjelaskan bahwa investasi pada manusia meningkatkan kualitas dan produktivitas sekaligus menjadi jalan keluar dari keterbelakangan (Wahed et al., 2021). Menurut Todaro (2000), human capital dapat diukur melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan kesadaran kesehatan, sementara kesehatan menunjang produktivitas dan pemanfaatan pendidikan. Keduanya saling berkaitan dan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan (Nurkholis, 2018). Adapun rekomendasi solusi kebijakan berdasarkan analisis tujuan, strategi dan Logical Framework Analysis (LFA), penanganan stunting Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan stunting, sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan bergizi, melalui peningkatan kemandirian pangan, fokus pada daerah rawan pangan, diversifikasi pangan lokal non-beras, pengembangan UMKM pangan, penguatan cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga, serta pengawasan keamanan pangan. Adapun solusi atau upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penguatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan lokal. Kedua, meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air minum layak, melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas. Adapun solusi yang dapat dilakukan ialah penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ketiga, mencegah dan menurunkan pernikahan dini, meliputi koordinasi dengan pemerintah kabupaten, sosialisasi kepada anak dan orangtua, kampanye dampak pernikahan anak, serta kolaborasi baik dengan dinas-dinas, organisasi masyarakat, maupun swasta. Adapun solusinya dengan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan dampak pernikahan usia dini serta penyediaan beasiswa dan dukungan pendidikan untuk keluarga kurang mampu agar anak tetap melanjutkan sekolah.

Keempat, peningkatan capaian pelaksanaan program pembangunan percepatan penurunan stunting, melalui peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan intervensi spesifik, sosialisasi kesehatan dan gizi melalui berbagai media, edukasi dan komunikasi perubahan perilaku oleh tenaga kesehatan, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)/kader, optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, serta narasi tunggal untuk edukasi gizi. peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan intervensi sensitif dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak disertai edukasi, bantuan tunai bersyarat dan pangan bagi Keluarga Berisiko Stunting (KRS), peningkatan cakupan KB pascapersalinan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, dan pendampingan KRS. Adapun solusinya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan secara konvergen dan berkualitas melalui sinergi lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Penanganan stunting dalam menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional dan kolaboratif. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan implementasi yang konvergen dan berkelanjutan, diharapkan Provinsi Sulawesi Barat mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Efektivitas strategi penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh kualitas upaya strategis, tetapi juga oleh peran anggaran yang memadai, efisien, efektif, dan tepat sasaran. Provinsi Sulawesi Barat, dapat memanfaatkan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) Penurunan Stunting, dan Dana Desa menjadi instrumen fiskal utama yang mendukung percepatan penurunan stunting khususnya pada lokus prioritas. Karena itu, alokasi anggaran perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak atau pengaruh besar terhadap penurunan stunting. Pemanfaatan APBD berperan dalam mendanai program lintas sektor di tingkat daerah, sementara DAK Penurunan Stunting memperkuat intervensi gizi. Di sisi lain, dana desa menjadi faktor penting dalam mendorong intervensi gizi, terutama pada desa-desa yang ditetapkan sebagai lokus prioritas. Untuk memastikan seluruh intervensi berjalan optimal, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan agar pemanfaatan anggaran benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang dianalisis melalui pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi rendahnya kinerja penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah masih tingginya prevalensi stunting, yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan konsumsi pangan bergizi, sanitasi dan air minum layak, tingginya pernikahan dini, serta rendahnya capaian program pembangunan percepatan penurunan stunting. Rekomendasi solusi kebijakan *Logical Framework Analysis* (LFA) dalam menangani stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah penguatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan lokal, penyediaan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, sosialisasi dan edukasi pencegahan dan dampak pernikahan usia dini serta penyediaan beasiswa pendidikan dan dukungan pendidikan untuk keluarga kurang mampu, serta peningkatan dan pengoptimalan pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara konvergen dan berkualitas melalui sinergi lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa. Penanganan stunting untuk menurunkan prevalensinya di Provinsi Sulawesi Barat harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional dan kolaboratif. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, penguatan komitmen pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, efektivitas strategi penurunan stunting juga ditentukan oleh peran anggaran yang memadai, efisien, efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, alokasi dan pemanfaatan anggaran perlu difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak terbesar terhadap percepatan penurunan stunting, dengan mempertimbangkan lokus prioritas serta kebutuhan kelompok sasaran utama. Pengawasan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan berjalan secara optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai melalui pendekatan *Logical Framework Analysis*.

6. Referensi

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan publik* (3rd ed.). Salemba Humanika.
- Andryansyah, T., & Dewi, S. (2024). Analisis peran pemerintah dalam mengupayakan pencegahan stunting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di Kecamatan Ampek Angkek. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 78–88.
- Apriska, L., Husni, V., Ici H., Anggara, J., & Fadlli, M. D. (2022). Strategi pemerintah desa dalam mencapai SDGs desa: (Studi kasus penurunan tingkat stunting di Desa Sakra Selatan). *Garuda Kemdikbud*, 82–90.
- Bapperida. (2023). Rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2024. Sulawesi Barat: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas PUPR. (2023). Rencana strategis 2023-2026. Sulawesi Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). Laporan perkembangan ekonomi & fiskal daerah: Penggunaan instrumen keuangan daerah penanganan stunting di daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Realisasi DAK tematik stunting. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Diskominfo. (2024). Buku data statistik sektoral Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024. Sulawesi Barat: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

RESEARCH ARTICLE

- Hadina, H., Hadriani, Muliani, & Batjo, S. H. (2022). Upaya pencegahan dan penanganan stunting. *Faletehan Health Journal*, 9(2), 176–184.
- Hasan, M., & Aziz, M. (2018). *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal* (2nd ed.). Makassar: CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung.
- Kawe, W., Semi, Y., Liu, G., Palla, A., & Lawalu, T. (2025). Peran gizi dalam pencegahan stunting sebagai investasi pembangunan ekonomi: Studi kasus di Uptd Puskesmas Kota Bajawa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(5), 3266–3274.
- Khotimah, K. (2022). Dampak stunting dalam perekonomian di Indonesia. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 113–132.
- Kristine Buulolo, P., & Saragih, M. W. (2024). Upaya mengurangi stunting dengan meningkatkan ketahanan pangan di Nias Selatan. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 4(1), 21–30.
- Macapagal, M. J. R., & Macasio, J. J. (2009). *Seri modul akademi esensi teknologi informasi dan komunikasi untuk pimpinan pemerintahan*. UN-APCICT.
- Noriyah. (2010). *Handbook for logical framework analysis*. Malaysia: Economic Planning Unit Prime Minister's Department.
- Nurkholis, A. (2018). Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory. *Open Science Framework*, 16.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Pratama, A. (2017). Analisis tingkat pertumbuhan penduduk terhadap harga tanah perspektif ekonomi Islam (Studi pada Kecamatan Jati Agung). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Wahed, M., Sishadiyati, & Imaningsih, N. (2021). *Ekonomi pembangunan kajian teori dan studi empiris*. Sumatra Barat: CV. Mitra Cendekia Media.